

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020, dunia dilanda kepanikan akibat penyebaran cepat corona virus disease 2019 (COVID-19). Virus ini pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019, menginfeksi orang. Hingga Januari, kasus positif telah mencapai ribuan dan mulai menyebar ke negara di luar China, dan berbagai negara mulai mengurangi masuknya penumpang dari China. Pada bulan Februari, kasus positif terus meningkat dan banyak negara mengeluarkan peringatan tentang wabah ini, melarang pertemuan dan menunda acara besar. Negara-negara lain mulai menerapkan tindakan penguncian selama pandemi.¹

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan pemeliharaan jarak (social distancing), pembatasan sosial massal (PSBB), kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk memblokir atau melarang, meninggalkan kawasan pemukiman atau kawasan. Belum ditemukan obat untuk Covid-19 pada saat itu, menimbulkan kekhawatiran tentang kapan pandemi ini akan berakhir dan situasi akan kembali normal.²

¹ Chairiana Ikfina, *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Persepektif Gender di* (Jurnal Kependudukan Indonesia Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, 2020), hlm. 39-41.

² Nikmatus Sholihah, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumber manjing wetan)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 1.

Didalam Al - Qur'an Allah SWT Menyebut dalam S. Al-Baqarah: 243 berbicara tentang larangan meninggalkan rumah dan menghindari orang yang terkena penyakit karena membawa virus menular.³

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۗ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu!" Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 243)

Hubungan antara Ayat Al – Qur’an diatas dengan Wabah COVID 19 ini iyalah tentang kesamaan aturan larangan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlaku saat ini ditengah maraknya penyebaran wabah COVID 19.

Pemerintah mengeluarkan aturan larangan keluar rumah dikarenakan pada saat itu vaksin untuk wabah ini belum ditemukan sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan maka darai itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang larangan keluar rumah dan menjaga jarak, dikarenakan untuk mencengah wabah ini semakin meluas keberbagai daerah dan penjuru diindonesia sama halnya dengan ayat Al–Qur’an diatas menjelaskan tentang larangan keluar kampung halaman.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Online dan Terjemahnya* <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=243&to=286> (diakses pada 8 juli 2023).

Hadis tentang Aturan saat Terjadi Wabah Penyakit⁴

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ‘*Tha’un* (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia, Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari dari padanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hubungan Hadist diatas hampir serupa dengan penjelasan ayat Al – Qur’an diatas yaitu larangan untuk bepergian atau meninggalkan kampung halaman namu bedanya hanya dari cakupan wilayah yang lebih luas dan besar seperti antar negara.

Krisis kesehatan global tahun 2020 juga telah mengurangi output ekonomi. Ini karena tindakan penguncian yang diberlakukan di berbagai negara mengurangi permintaan global besar pada waktu yang bersamaan dan mengganggu arus barang. Akibatnya, harga komoditas yang berbeda jatuh di pasar internasional. Berdasarkan data yang dirilis BAPPENAS Bidang Perekonomian, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% pada kuartal pertama 2020.⁵

Hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang lambat. Perekonomian Indonesia masih lebih unggul dari kinerja negara lain. Ini adalah, karena ekonomi Indonesia telah didukung oleh sektor manufaktur, perdagangan dan pertanian, meskipun pertumbuhan melambat. Sektor-sektor yang berkembang pesat dalam pandemi ini

⁴<https://www.orami.co.id/magazine/hadis-dan-ayat-alquran-tentang-wabah-penyakit> diakses pada tanggal 01 april 2022 pada pukul 10.00

⁵ Deputi Bidang Ekonomi, “Perkembangan Indonesia dan dunia Ancaman Resesi Dunia Akibat Pandemi (Laporan Triwulan I tahun 2020, Bappenas, Jakarta, 2020), vol. 4, edisi 1.

meliputi jasa keuangan dan asuransi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Krisis ekonomi telah berdampak pada masyarakat pedesaan. Mempengaruhi semua kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah badan hukum masyarakat yang ditetapkan sebagai desa dan batas wilayah mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, prakarsa masyarakat, hak asal usul dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat, hak untuk Mengelola dan menghormati Pemerintah Republik Indonesia (NKRI) dalam sistem desa tersebut merupakan provinsi otonom dengan hak khusus, salah satunya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Mayoritas masyarakat tingkat desa berprofesi sebagai petani, pedagang dan tenaga kerja di luar negeri.⁶ Akibat kebijakan di masa pandemi, petani sering mengalami kerugian akibat ketidak stabilan harga komoditas, pedagang kehilangan penjualan karena *overcrowding* dan larangan keluar rumah, serta banyak tenaga kerja asing, tenaga kerja lain, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah prioritas anggaran pendapatan desa (APBDesa) dalam rangka mencegah penyebaran pandemi dan mendukung perekonomian masyarakat desa yang terkena

⁶ Nikmatu Sholihah, "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)*" (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (Uin)Maulana Malik Ibrahim Malang 2021). hlm. 2

dampak. Pada dasarnya APBDesa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

APBDesa akan dibuat sesuai rencana Pembangunan didefinisikan dalam urutan kronologis oleh Peraturan Desa. Rencana ini mencakup rencana pembangunan jangka menengah 6 tahun untuk desa (RPJM Desa) dan rencana pembangunan tahunan untuk desa. akuntabel, partisipatif, dan menghormati ketertiban dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ketat sesuai dengan pedoman peraturan, khususnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa, yang menguasai keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa. Dengan bantuan aparat desa, pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat terdistribusi secara efektif dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, selain perlu adanya pengawasan oleh pemerintah dan Badan Pengawasan Desa (BPD), juga diperlukan peran serta aktif masyarakat untuk memantau kegiatan pemerintah desa. Dari tahap perencanaan, sampai tahap pelaksanaan, melalui penjelasan dalam laporan, tahap perencanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal dan kesejahteraan masyarakat desa juga meningkat.⁷

Perubahan situasi dan kondisi yang tidak terduga akibat pandemi telah mengakibatkan sejumlah perubahan anggaran sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat,

⁷ Nikmatus Sholihah, *Analisis Efektivitas Pengelolaan....*, Hlm. 3

pemerintah desa harus menganggarkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Akibatnya, terjadi pergeseran anggaran antar sektor. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memperhatikan pelaksanaan setiap program yang akan direncanakan. Jika pelaksanaannya tidak sesuai jadwal, akan sulit menjamin keamanan masyarakat meski dengan anggaran yang besar.⁸

Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa harus mengelola anggaran desa secara efisien dan terpusat agar pemerintah dapat mencapai visi dan misinya. Masyarakat memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam upaya membangun desa. Selain itu, masyarakat juga harus ikut memantau kegiatan perangkat desa, sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana proses dan tata cara bagaimana perangkat desa bekerja.

Di masa pandemi ini, akibat guncangan ekonomi, banyak orang semakin tertekan secara ekonomi. Sementara itu, bantuan yang dibiayai oleh pemerintah desa tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Sehingga, masyarakat merasa kecewa, marah dan kesal karena mereka juga menginginkan bantuan tersebut tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jelapat I dalam upaya penanganan wabah Covid 19 ini. Selain itu, peneliti adalah salah satu warga Desa Jelapat I, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana cara aparat desa dalam mengelola anggaran dan melaksanakan manajemen pemerintahan di desa, terutama pada era pandemi ini.

⁸ Nismawati “*Pengelolaan Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19(studi kasus Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bonge)* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar 2021). hlm. 6

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan Penelitian mengenai **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Upaya Penanganan Pandemi COVID 19 Tahun 2020 - 2022 (Studi Kasus Desa Jelapat I di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”**.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan yang telah disajikan dalam latar belakang, serta dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan secara lebih rinci, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penanganan pandemi covid 19 tahun 2020–2022 (studi kasus Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh aparat desa dalam penanganan covid 19 sehingga dapat membantu masyarakat yang terkena dampaknya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, yakni:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jelapat I Tahun 2020-2022.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Desa Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Di Desa Jelapat I.

⁹ Nikmatas Sholihah, *Analisis Efektivitas Pengelolaan...*, hlm. 3

D. Signifikasi Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat yaitu:

1. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi sumber daya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan perbaikan dan memantau pelaksanaannya. Tata kelola yang lebih baik.
2. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk menambah pengetahuan.
3. Bagi peneliti/cendekiawan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan memperluas pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman beberapa istilah yang digunakan dalam judul, peneliti memberikan ruang batasan istilah berikut:

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang diartikan sebagai efektif, efisien, efektif atau efisien.¹⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, semakin banyak hal ini dicapai, dianggap lebih efisien.

¹⁰ KBBI Daring, diakses melalui <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/-efektif>, 1 April 2022 pukul 16.52

2. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.¹¹ Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa.

3. Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti disediakan untuk suatu keperluan; biaya.¹²

4. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan.¹³ Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

5. Penanganan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.¹⁴

¹¹KBBI daring diakses melalui 10 II. Tinjauan Pustaka A. Definisi Penggunaan Dalam Kamus Besar ... , 2002:852 (diakses pada 1 April 022).

¹² Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://kbbi.web.id/dana.html> (diakses pada 2 April 2022).

¹³ Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://kbbi.web.id/upaya.html> (diakses pada 2 April 2022).

¹⁴ Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://kbbi.web.id/penanganan.html> (diakses 1 November 2022).

6. Pandemi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pan·de·mi /*pandémi*/ wabah yang berjangkit serempak di mana-mana,¹⁵ meliputi daerah geografi yang luas.

7. Covid-19

Nama penyakit yang disebabkan virus corona atau virus SARS-CoV-2.¹⁶

8. Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah satu kesatuan suatu wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan satu sistem Pemerintahan sendiri di bawah pimpinan kepala desa. Sebaliknya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, apa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan dusun adat atau yang selanjutnya disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan negara Hak yang diakui dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, apa yang dimaksud dengan kepala desa Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pengelolaan NKRI. Pemerintahan desa dilakukan oleh perangkat desa atau perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Badan Desa adalah Kepala Desa atau

¹⁵ Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://kbbi.web.id/pandemi.html> (diakses pada 1 november 2022).

¹⁶ Kemendikbud Ristek RI, *KBBI Daring* <https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kamus-istilah-dalam-Covid-19> (diakses pada 1 november 2022).

yang disebut dengan nama lain yang disetujui oleh perangkat desa sebagai unsur administrasi desa.

F. Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini membutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai aspek. Beberapa referensi yang relevan dengan pembahasan ini, adalah:

1. Nikmatus Sholihah (2021) "Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)"¹⁷ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah desa pada awal masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDesa di Desa Sumberagung tahun anggaran 2020 adalah sangat baik. Hasil ini diperoleh dengan tingkat penyerapan dana yang dihasilkan dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Tingkat penyerapan anggaran Desa Sumberagung tahun anggaran 2020 yang mencapai 84%. Sementara sasaran dan tujuan dari program-program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dapat

¹⁷ Nikmatus Sholihah, "*Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)*" (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang 2021)

tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Beda pada Penelitian peneliti dengan penelitian ini memiliki metode penelitian yang sama namun dengan lokasi yang berbeda.

Dimana pokok pembahasan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Ditengah Pandemi Desa Sumberagung, Sedangkan pokok pembahasan peneliti adalah bagaimana Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 didesa Jelapat I.

2. Skripsi Nursela Ayu (177310610) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021 yang berjudul "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar".¹⁸ Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyaluran BLT-Dana Desa ke masyarakat didesa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung sudah mempergunakan dana desa untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19, namun masih terdapat kendala maupun hambatan dalam penyalurannya yaitu masih adanya masyarakat yang belum jujur yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis.

¹⁸ Nursela Ayu, "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2021)

Pada penelitian ini peneliti memiliki jenis metode penelitian yang sama namun dengan topik dan lokasi yang sangat berbeda. Dimana pokok bahasan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan penyaluran dana desa dalam upaya pencegahan wabah Covid-19 dikecamatan Kampar. Sedangkan pokok pembahasan peneliti adalah bagaimana upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan dana desa didesa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

3. Skripsi Nismawati (E011171017) Jurusan Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)".¹⁹ Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif .

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bulu Allaporeng kecamatan Bengo Kabupaten Bone di tengah Pandemi Covid-19, dengan informan kepala Desa beserta aparat pemerintah Desa Bulu Allaporeng yang dimana fokus penelitiannya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penatausahaan, dan laporan pertanggung jawaban.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa

¹⁹ Nismawati, "Penelolaan Dana Desa di tengah Pandemi Covid-19 (studi kasus di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar 2021)

ditengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk Infrastruktur harus di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat.

Pesamaan penelitian ini dengan peneliti iyalah sama – sama membahas tentang dana desa sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti iyalah permasalahan dan pembahasan yang dibahas oleh peneliti didesa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

4. Skripsi Daniel Ortega (17520082) Jurusan Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta 2021 yang berjudul " Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat".²⁰ Didalam skripsi ini peneitian menggunakan jenis motode deskriptip Kualitatif.

Tujuan penelitan ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan bantuan lansung tunai dari dana desa pada Masyarakat Terdampak Covid-19. Manfaat penelitian ini antara lain yaitu penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, menambah pengetahuan mahasiswa tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa, memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Pak Bulu.

²⁰ Daniel Ortega, (*Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa pada Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat*)” (Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat desa (APMD) Yogyakarta 2021)

Hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil empat kesimpulan yaitu;

pertama komunikasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat dengan memberikan surat undangan, memasang banner/baliho dan melakukan musyawarah.

Kedua Sumber Daya pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak Covid-19 antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas.

Ketiga disposisi yang ada pada pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak Covid-19 sikap ramah, sopan satun, transparansi, cepat dalam merespon dan mau memberikan pengarahannya atau penjelasan.

Keempat Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dari dana desa pada masyarakat terdampak Covid-19 Kepala Desa, Seketaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pemerintahan, dua Kepala Dusun dan berserta masingmasing kewenangannya.

Persamaan Penelitian Ini ialah dibagian Metode penelitian sedangkan perbedaannya ialah terletak pada bagian Pokok pembahasannya yang mana penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan dan penentuan kretetia bagi penerima bantuan langsung tunai didesa pak Bulu Kecamatan Ajongan Kabupaten Mampawah. Sedangkan pokok pembahasan peneliti ialah mengenai

keefektivan penggunaan dana desa dalam upaya pencegahan wabah penyakit Covid-19 didesa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

5. Skripsi Fahri Aldi (1706200146) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021. Yang Berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Di Indonesia".²¹ Dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis yuridis normatif.

Tujuan penelitian ini Setiap orang berhak untuk mendapatkan manfaat dan keadilan dari kebijakan hukum yang di buat oleh pihak yang berwenang baik di masa lalu atau pun dimasa krisis pandemi Covid-19. Hak masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera dijamin negara dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (a) Undang Undang 1984 tentang wabah penyakit menular terlalu usang dan perlu di perbaharui dan Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Kesehatan sebab pasal 9 dan pasal 93 dinilai terlalu karet (b) implementasi dari kebijakan pemerintah masih terdapat banyak kekurangan sebab ada oknum-oknum yang masih memanfaatkan situasi krisis untuk mematikan lawan politik.

Kerumunan masih terjadi dimana mana, pelaksanaan pilkada terlalu dipaksakan dan pembebasan narapidana yang menaikkan angka kriminalitas (c) faktor yang menjadi penghambat dinatarnya budaya masyarakat Indonesia, setiap orang punya kepentingan masing-masing dan narasi negatif.

²¹ Fahri Aldi, "*Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021)

Persamaan penelitian ini ialah bagaimana cara kebijakan penyebaran wabah Covid-19. Sedangkan perbedaannya sangat jauh berbeda dikarenakan penelitian ini membahas mengenai tindak pidana sedangkan peneliti membahas mengenai penggunaan dana desa.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan sistematika penulisan untuk digunakan sebagai pedoman persiapan studi sebagai berikut. Gambaran Umum.

Bab I. Meliputi uraian Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah membahas mengenai bagaimana Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito kuala). Dan Apa saja Kendala Yang dialami Oleh Aparat Desa dalam Penanganan Covid-19, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana desa pada masa Pandemi Covid-19 di desa Jelapat I pada Tahun 2020 – 2022 dan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh aparat desa dalam penanganan wabah Covid-19 di Desa Jelapat I, kegunaan penelitian salah satunya sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan, definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman istilah yang digunakan dalam judul penelitian, tinjauan pustaka ialah beberapa skripsi terdahulu yang menjadi bahan referensi bacaan peneliti dalam penelitian, metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan, bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, dan sistematisasi digunakan sebagai pendoman dalam penulisan.

Bab II. Landasan Teori berisi teori rinci yang menjadi dasar penelitian ini, termasuk desa Jelapat I Kabupaten Balito Kabupaten Kuala. Oleh karena itu, pasal Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK RI No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019. pengelolaan dana desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah prioritas anggaran pendapatan desa (APBDesa)

Bab III. Metode Penelitian. Meliputi metode penelitian, meliputi jenis, jenis pendekatan penulisan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

Bab IV. Merupakan laporan dan analisis dari kajian efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Bab V. Kesimpulan dan saran.